

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu aspek yang mendasar dalam usaha mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi proses dan dinamika kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pluralitas. Pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, terus menerus dan berlangsung seumur hidup, dalam rangka mewujudkan manusia dewasa, mandiri, bertanggung jawab serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Oleh karenanya kemajuan suatu bangsa dapat ditandai dan diukur dari kemajuan pendidikannya. Kemajuan beberapa Negara di dunia ini tidak terlepas dari kemajuan yang dimulai dan dicapai dari pendidikannya (Maksum dan Ruhendi, 2005: 227).

Dalam pelaksanaannya, pendidikan yang diharapkan adalah pendidikan yang bermutu atau berkualitas. Kualitas pendidikan meliputi (1) produk pendidikan yang dihasilkan, (2) proses pendidikan, menyangkut pengelolaan kelas, metode pengajaran yang tepat serta lingkungan yang kondusif dan (3) adanya kontrol pada sumber-sumber pendidikan yang ada (Sihombing, 2005: 7).

Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama dari program pendidikan nasional pada saat ini. Peningkatan mutu pendidikan merupakan tugas berat dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Proses peningkatan mutu pendidikan adalah upaya yang kompleks karena menyangkut perencanaan, pendanaan dan pengelolaan proses belajar-mengajar (Cahyana, 2009: 2).

Untuk meningkatkan mutu pendidikan pemerintah telah menempuh berbagai strategi antara lain: 1) penyempurnaan kurikulum menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan, 2) penyediaan fasilitas fisik dan media pendidikan, 3) peningkatan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dan 4) peningkatan kesejahteraan dan berbagai jenis kegiatan lainnya (Al-Asyi, 2008: 1).

Berbagai masalah yang terjadi dan belum terciptanya kualitas atau mutu pendidikan yang dicita-citakan, mensyaratkan bahwa pendidikan di Indonesia harus terus dibangun dan dibanahi. Dalam hal ini ada empat aspek sasaran pembangunan pendidikan, yaitu (1) pembangunan pendidikan harus dapat menjamin kesempatan belajar bagi warga masyarakat secara keseluruhan; (2) pembangunan pendidikan harus memiliki relevansi yaitu proses pendidikan yang dilakukan dan lulusannya harus dapat memenuhi kebutuhan industri; (3) pembangunan pendidikan harus diarahkan pada mutu pengajaran dan lulusan, dimana hal ini akan tergantung pada efektivitas belajar-mengajar dan sumber daya pendidikan seperti guru yang bermutu,

dana, fasilitas dan infrastruktur yang memadai; (4) pembangunan pendidikan harus mengarah pada terciptanya efisiensi pengelolaan pendidikan (Zainuddin, 2008: 3-4).

Proses pendidikan yang bermutu akan membuahkan hasil pendidikan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan efisien perlu disusun dan dilaksanakan program-program pendidikan yang mampu membelajarkan peserta didik secara berkelanjutan, karena dengan kualitas pendidikan yang optimal, diharapkan akan dicapai keunggulan sumber daya manusia yang dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang (Yusuf, 2010: 4).

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu didasarkan pada empat ukuran/indikator, yaitu (1) mutu produk/lulusan, (2) mutu proses pembelajaran, (3) mutu layanan sekolah dan (4) mutu lingkungan sekolah. Mutu produk/lulusan pendidikan dapat dinilai berdasarkan nilai ujian akhir nasional/sekolah yang tinggi. Tetapi tentunya nilai bukan satu-satunya ukuran, harus didukung dengan ukuran lainnya yaitu lulusan lembaga pendidikan juga mempunyai kecakapan dan ketrampilan untuk hidup (*life skills*), yang dapat dimanfaatkan untuk bekal hidup peserta didik di masyarakat. Selain itu tentunya lulusan pendidikan juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yang responsif terhadap persoalan sosial yang ada. Mutu proses pembelajaran sangat ditentukan pada profesionalisme guru. Guru dalam pembelajaran tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan semata tetapi juga

mendidik, mengarahkan dan menggerakkan siswa agar menjadi manusia seutuhnya, tidak hanya pandai dan terampil tetapi juga berintegritas serta berbudi pekerti yang luhur. Mutu layanan sekolah yang baik tidak hanya layanan kepada siswa akan tetapi kepada orang tua, tamu sekolah dan lain sebagainya. Mutu layanan juga ditentukan dari kemampuan pelaku sekolah untuk dapat menjalin hubungan dan memberikan pelayanan yang terbaik pada seluruh *stakeholder* sekolah. Mutu lingkungan sekolah ditunjukkan dengan sekolah yang bersih, indah, damai. Dengan lingkungan yang baik akan menciptakan kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah (Arifin, 2007: 1).

Dalam kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Hal ini dibuktikan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Menurut *Survey Political and Economic Risk Consultant*, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2002), Indonesia memiliki daya saing rendah yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia (Subadi, 2009: 89).

Sedangkan menurut Laporan *World Competitiveness Report 2005*, peringkat daya saing Indonesia masih rendah. Indonesia masih berada pada ranking ke-58 dari 60 negara paling kompetitif di dunia yang disurvei. Posisi ini di bawah Singapura (3), Thailand (27), Malaysia (28) dan Filipina (49).

Apalagi dibanding “*Asian Runner*” lain seperti Hongkong (2), Taiwan (11), Jepang (21), Korea (29), China (31) dan India (39) (Nugroho, 2008: 100).

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. (Ganis, 2010: 1).

Kualitas dan relevansi pendidikan yang belum sesuai sangat berkaitan dengan input-output proses pembelajaran tampak pada pencapaian ratio hasil ujian akhir, penerapan kurikulum yang padat, terbatasnya penyediaan sarana/prasarana pendidikan, rendahnya mutu, kesejahteraan dan kekurangan tenaga kependidikan serta terjadinya kurang relevansi (*miss match*) antara tamatan pendidikan dengan kualitas/standar kompetensi dan kebutuhan dunia usaha/industri (Subadi, 2009: 90).

Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini masih belum sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20/2003 pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa, setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Dalam tiga tahun terakhir, media massa melaporkan tentang mutu infrastruktur pendidikan yang belum memadai. Jumlah gedung yang rusak semakin bertambah, yaitu gedung SD/MI sebanyak 57,2%, gedung SMP 27,3%, dan gedung SMA sebanyak 7,66%. Kondisi ini diperburuk dengan

kondisi keuangan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara merata (Nugroho, 2008: 68).

Jika dilihat kenyataan di lapangan, bahwa hanya sekolah-sekolah tertentu di beberapa kota di Indonesia saja yang memenuhi persyaratan, dimana pada umumnya hanya sekolah negeri dan swasta favorit. Berdasarkan fakta ini, keterbatasan sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah tertentu, pengadaannya selalu dibebankan kepada masyarakat. Alasannya pun telah dilegalkan berdasarkan Kepmendiknas No. 044/U/2002 dan Undang-Undang Sisdiknas No. 20/2003 pasal 56 ayat (1). Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, ayat (2) Dewan pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis, dan ayat (3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Anonim, 2008: 3).

Peningkatan mutu pendidikan akan berhasil jika seluruh komponen pendidikan yang terkait berfungsi dan bersinergi secara optimal. Salah satu komponen yang sangat menentukan keberhasilan tersebut adalah pengelolaan

administrasi sekolah. Walaupun dalam suatu lembaga pendidikan telah tersedia semua komponen yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, namun tanpa adanya pengelolaan administrasi sekolah yang bermutu, maka peningkatan mutu pendidikan tidak mungkin terwujud.

Sebagai suatu sistem, sekolah terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Berbagai input mulai dari siswa, guru, biaya, serta *instrumental* dan *environmental input* lainnya harus dapat didayagunakan seefektif mungkin dalam proses transformasi, untuk menghasilkan output berupa peserta didik yang memiliki seperangkat nilai, sikap, pengetahuan serta keterampilan baru. Untuk mendayagunakan semua sumber daya tersebut, diperlukan pengelolaan administrasi sekolah yang baik (Anonim, 2008: 3).

Administrasi dapat dipandang sebagai proses dan dapat pula dipandang sebagai tugas (kewajiban). Administrasi sebagai proses sama dengan administrasi dalam arti luas. Administrasi sebagai proses kegiatan meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/kepemimpinan dan pengawasan/pengendalian. Keempat komponen tersebut merupakan suatu sistem yang terpadu, yakni antara satu dengan lainnya saling berkaitan secara utuh. Artinya, perencanaan harus diorganisasikan, diarahkan, dan diawasi. Pengorganisasian juga harus direncanakan, diarahkan, dan kemudian dikendalikan. Begitu pula pengendalianpun harus direncanakan, diorganisasikan, dan diarahkan. Oleh karena itu administrasi sekolah merupakan kegiatan penyediaan, pengaturan dan pendayagunaan segenap

sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Adapun bidang tugas yang harus dikelola di dalam administrasi sekolah antara lain mencakup: (1) administrasi kurikulum dan pembelajaran (2) administrasi kesiswaan, (3) administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, (4) administrasi sarana dan prasarana pendidikan, (5) administrasi keuangan/pembiayaan, (6) administrasi program hubungan sekolah dengan masyarakat, (7) administrasi program bimbingan dan konseling, dan (8) administrasi persuratan (Anonim, 2008: 4).

Dalam dasa warsa terakhir berkembang visi dan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan umumnya, dan sekolah khususnya. Apabila pada era sebelumnya sekolah dipandang sebagai bagian dari birokrasi pendidikan, maka sekarang ini sekolah adalah lembaga yang melayani masyarakat. Pergeseran paradigma ini berimplikasi luas dalam administrasi dan pengelolaan sekolah. Paling tidak ada tiga prinsip atau azas yang harus selalu diperhatikan dalam pengelolaan sekolah, yaitu: partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan yang selama ini belum menggembirakan. Partisipasi, menuntut setiap penyelenggara dan pengelola sekolah melibatkan *stakeholder* dalam perumusan berbagai kebijakan. Transparansi mengharuskan sekolah terbuka, terutama dalam perolehan dan penggunaan dana, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat (Anonim, 2008: 1).

Dengan adanya pergeseran paradigma tersebut, maka kepala sekolah semakin dituntut serius, berhati-hati dan terbuka dalam administrasi dan pengelolaan sekolah. Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional berbagai kegiatan telah dilakukan diantaranya dalam pengelolaan administrasi sekolah yang mencakup diantaranya dalam peningkatan jenis mutu prasarana dan sarana pendidikan. Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional dimaksud, maka kegiatan-kegiatan tersebut di atas harus ditunjang oleh pelayanan administrasi sekolah yang teratur, terarah, dan terencana. Pelayanan administrasi sekolah yang baik akan menunjang penyelenggaraan proses belajar dan mengajar yang baik pula. Penyelenggaraan proses belajar yang baik akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa seperti yang diharapkan oleh tujuan Pendidikan Nasional yang hendak dicapai.

Pelayanan administrasi sekolah yang baik harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh instansi atau unit yang relevan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Agar semua sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan di sekolah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan administrasi sekolah yang berlaku, perlu disusun suatu pedoman umum administrasi khusus untuk sekolah, yang memuat penjelasan mengenai cara pelayanan administrasi terhadap komponen-komponen pendidikan di sekolah untuk semua tingkat, jenis dan jenjang pendidikan. Pedoman tersebut diperlukan selain memantapkan pelaksana di dalam menjalankan tugasnya disekolah, juga akan memudahkan pelaksanaan supervisi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan teknis edukatif

yang ditunjang oleh pelayanan administrasi yang efektif dan efisien akan meningkatkan mutu hasil belajar siswa (Widayati, 2007: 1).

Administrasi sekolah terkait dengan manajemen sekolah yang isinya merupakan pengelolaan dan juga pelaksanaannya. Salah satu alat ukur mutu pengelolaan administrasi pada suatu sekolah dapat dilihat pada tingkat kinerja sekolah tersebut. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan di sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, dan inovasinya. Khusus yang berkaitan dengan kualitas dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar peserta didik, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik. Oleh karena itu dengan adanya pengelolaan administrasi sekolah berbasis mutu, maka akan menghasilkan *out put* sekolah yang bermutu (Umboh, 2010: 3).

SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta, merupakan Sekolah Menengah Kejuruan dengan bidang keahlian Bisnis dan Manajemen di wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sekolah ini didirikan pada tahun 1952 dengan SK Bupati Sleman No. 319982/Kab/52 tanggal 10 September 1952. Pada awalnya SMK Negeri 1 Depok bernama SMEA Negeri 1 Yogyakarta yang dahulu berlokasi di Gowongan Kidul, Yogyakarta. Baru pada tahun 1982 SMEA Negeri 1 Yogyakarta tersebut di pindah ke Maguwoharjo, Depok, Sleman sampai sekarang. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 031/O/1997

tanggal 7 Maret 1997 Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri 1 Yogyakarta berganti nama menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Depok, Sleman, Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Ring Road Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Sejak Tahun Ajaran 2008/2009, SMK Negeri 1 Depok merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), SMK Negeri 1 Depok mau tidak mau harus memenuhi semua prasyarat sebagai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Salah satu syarat tersebut adalah dengan mengantongi Sertifikat SMM ISO 9001:2000. Sebagai bukti nyata dan langkah maju, SMK Negeri 1 Depok akhirnya *melaunching* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di Villa Taman Eden Kaliurang pada tanggal 19 Agustus 2009 ditandai dengan nota komitmen seluruh TOP manajemen sekolah, Wakil Manajemen Mutu dan semua unit kerja serta perwakilan siswa SMK Negeri 1 Depok. SMK Negeri 1 Depok juga menerima Sertifikat ISO 9001-2000 yang diserahkan oleh Bupati Sleman pada tanggal 12 Oktober 2010. Kemampuan SMK Negeri 1 Depok dalam meraih ISO bukan hanya sekedar menata kembali sistem, prosedur, dan administrasi pelayanan, tetapi juga diiringi dengan perubahan sikap mental seluruh *stakeholder* yang ada di SMK Negeri 1 Depok. Diterimanya sertifikat ISO ini merupakan bukti pengakuan atas kualitas sekolah SMK Negeri 1 Depok. Disamping itu diraihnya sertifikat ISO ini akan semakin memperkuat akreditasi yang telah dilakukan. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dalam organisasi SMK Negeri 1 Depok,

membuat meningkatnya perhatian manajemen terhadap personelnnya dalam struktur organisasi. Susunan orang-orang yang tepat dalam sebuah struktur organisasi akan menimbulkan suatu kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Dalam hal ini, Wakil Kepala sekolah di SMK Negeri 1 Depok dipilih secara terbuka. Dengan adanya pemilihan secara terbuka, hal ini dapat dikatakan bahwa jabatan wakil kepala sekolah diduduki oleh orang-orang yang tepat, karena pilihan terhadap pejabat yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan pengalaman dan kinerja selama ini.

Dalam hal prestasi, SMK Negeri 1 Depok telah banyak mengukir prestasi baik di bidang akademik maupun bidang non akademik baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun tingkat Nasional. Dalam mencapai beberapa prestasi tersebut, selain pemilihan bibit-bibit sejak dari awal, para siswa juga dididik dan dilatih secara mental, agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dalam hal pembinaan mental ini, SMK Negeri 1 Depok bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kapilawastu. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh sekolah lain. Namun dalam hal pengelolaan administrasi sekolah, penulis masih ingin melakukan penelitian secara mendalam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul “Pengelolaan Administrasi Sekolah Berbasis Mutu Studi Situs SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana karakteristik pengelolaan administrasi sekolah berbasis mutu, studi situs SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta ?

Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi tiga sub fokus :

1. Bagaimana karakteristik SOP administrasi sekolah di SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta ?
2. Bagaimana karakteristik tata arsip administrasi sekolah di SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta ?
3. Bagaimana karakteristik struktur dan fungsi organisasi sekolah di SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang pengelolaan administrasi sekolah berbasis mutu studi situs di SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta berdasarkan fokus penelitian di atas adalah :

1. Mendeskripsikan karakteristik SOP administrasi sekolah di SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta
2. Mendeskripsikan karakteristik tata arsip administrasi sekolah di SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta
3. Mendeskripsikan karakteristik struktur dan fungsi organisasi sekolah di SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah perbendaharaan khasanah keilmuan di dunia pendidikan pada umumnya.
- b. Bagi SMK Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian tentang pengelolaan administrasi sekolah berbasis mutu.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan, sumbangan wawasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan.
- b. Bagi Kepala Sekolah, sebagai bahan masukan untuk perbaikan mutu administrasi sekolah.
- c. Bagi Guru, sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

E. Definisi Istilah

1. Administrasi Sekolah

Administrasi sekolah adalah pengaturan dan pendayagunaan segenap sumber daya sekolah secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan di sekolah tercapai secara optimal.

2. Struktur Organisasi Sekolah

Struktur Organisasi Sekolah adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam administrasi sekolah untuk menjalankan kegiatan operasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

3. Fungsi Organisasi Sekolah

Fungsi Organisasi Sekolah adalah sebagai wadah untuk meningkatkan kerjasama, pengaturan dan pendayagunaan segenap sumber daya sekolah secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan di sekolah tercapai secara optimal.

4. Kearsipan Sekolah

Kearsipan Sekolah adalah suatu sistem penyimpanan arsip sekolah secara sistematis dengan tujuan agar dokumen/arsip dapat diketemukan kembali secara cepat dan tepat apabila sewaktu-waktu diperlukan.

5. SOP Administrasi Sekolah

SOP Administrasi Sekolah adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi sekolah yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan petugas yang berperan dalam kegiatan pelayanan administrasi sekolah.